

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN *RISK
MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro Semarang

Disusun oleh:

ROSMI NURUL HABIBAH
NIM. C2C009153

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rosmi Nurul Habibah
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009153
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pembentukan *Risk Management Committee*
(RMC)**

Dosen Pembimbing : Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt

Semarang, 09 April 2012

Dosen Pembimbing,

(Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt)

NIP. 19711225 199903 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Rosmi Nurul Habibah
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009153
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi
Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pembentukan Risk Management Committee
(RMC)**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 19 April 2013

Tim Penguji

1. Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)

2. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt. (.....)

3. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rosmi Nurul Habibah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Pembentukan *Risk Management Committee* (RMC), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/ atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 04 April 2012

Yang Membuat pernyataan,

(Rosmi Nurul Habibah)

NIM: C2C009153

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors which influential the establishment of Risk Management Committee (RMC) in non financial firms. The factors that use in this study are audit committee characteristic and board characteristic that consist of audit committee independency, audit committee size, audit committee activity, audit committee expert, board size, proportion of independence commissioners and board dilligence. This study also use other factors such as firm size, business complexity, leverage and auditor reputation.

Sample of this study were non financial firms listed on Indonesian Stock Exchange which the data detectable on Bloomberg for the observation period of 2009 until 2011. A number of 74 firms to be sample in this research that choosing by purposive sampling method. Statistical method that used for the hypotesis is logistic regression analysis.

The result for this study is founded that audit committee size, audit committee activity and board activity is related positive and significant to the establishment RMC. Firm size and bussiness complexity as control variabel also related positive and significant to the establishment RMC.

Keywords: Risk Management Committee, corporate governance, audit committee, board commisioner

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pembentukan *Risk Management Committee (RMC)* di perusahaan non finansial. Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah karakteristik komite audit dan karakteristik dewan komisaris yang terdiri dari independensi komite audit, ukuran komite audit, ketekunan komite audit, keahlian komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan ketekunan dewan komisaris sebagai variabel independen. Di dalam penelitian ini juga diteliti faktor ukuran perusahaan, kompleksitas usaha, leverage, dan reputasi auditor sebagai variabel kontrol.

Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang datanya dapat diperoleh di Bloomberg dengan periode penelitian dari tahun 2009 hingga 2011. Sejumlah 74 perusahaan non finansial menjadi sampel dalam penelitian ini yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi logistik.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran komite audit, aktivitas komite audit, dan aktivitas dewan komisaris berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. Ukuran perusahaan dan kompleksitas usaha sebagai variabel kontrol juga berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Kata kunci : *Risk Management Committee, corporate governance*, komite audit, dewan komisaris

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya.

Barangsiapa yang melapangkan suatu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan dihari kiamat.

Dan barangsiapa yang menutupi kejelekan orang lain maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)
(QS Al-Insyirah : 6-7)

Better late than never, don't be regret and always try to awaken your courage and do the best (anonim)

You are never too old to set another goal or to dream a new dream (C.S Lewis)

Ora et Labora

Persembahan

Untuk kedua orang tuaku yang selalu menyayangi dan mendukungku

Kakak-kakakku yang selalu menjadi panutanku

Keponakan – keponakanku yang ngegemesin

Sahabat-sahabatku yang selalu menyayangi dan membantuku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan skripsi berjudul “**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBENTUKAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)***” dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Marsono, S.E., M.Adv. Acc., Akt., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan saran, nasihat, dukungan, bimbingan dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Anis Chariri, S.E., MCom, Ph.D, Akt., selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam bidang akademis.
4. Bapak Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku ketua jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, khususnya Dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu dan bimbingan yang berharga bagi penulis.
6. Mama, Entin Rozanah dan Ayah, Maturidi serta kakakku tercinta, mba Erma dan Mba Ermi atas cinta, doa dan dukungan serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis dapat menjadi yang seperti kalian harapkan dan dapat membanggakan kalian.
7. Pamanku, Ami Chafid yang telah banyak membantu penulis baik moril maupun materil selama kuliah.
8. Sahabat-sahabatku: Siska, Eri, Zahra, Nibras dan Monica serta adik kosku Nia yang telah menjadi sahabat bagi penulis selama ini dan telah banyak membantu penulis selama kuliah serta selalu memberikan dukungan, motivasi dan pelajaran hidup bagi penulis. Thank You My Friend.
9. Teman-teman satu bimbingan: Veli, Dewi, Mega, Glory dan Andin. Terima kasih untuk kebersamaannya selama bimbingan dan untuk pengalaman bimbingan yang tak terlupakan.
10. Teman-teman Akuntansi 2009 yang selalu memberikan dukungan dan bantuan bagi penulis dari semester satu hingga semester akhir.
11. Teman-teman KKN desa Jungsemi Kabupaten Kendal, Petrus, Aisya, Gema, Jesty dan Indra. Terimakasih untuk kebersamaan dan persahabatannya selama 30 hari, semoga kita semua dapat menjadi orang sukses. Jungsemi selalu Bersemi!

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak keterbatasan yang disebabkan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membacanya.

Semarang, 04 April 2013

Penulis,

Rosmi Nurul Habibah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TELAAH PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Keagenen	11

2.1.2 Risiko	13
2.1.3 Manajemen Risiko	13
2.1.4 Good Corporate Governance	15
2.1.5 Risk Management Committee	16
2.1.6 RMC di Perusahaan Perbankan	18
2.1.7 Komite Audit	19
2.1.7.1 Independensi komite audit	21
2.1.7.2 Ukuran Komite Audit	22
2.1.7.3 Aktivitas komite audit	23
2.1.7.4 Keahlian Akuntansi atau Keuangan komite audit....	24
2.1.8 Dewan Komisaris	25
2.1.8.1 Ukuran Dewan Komisaris	26
2.1.8.2 Proporsi Komisaris Independen	27
2.1.8.3 Ketekunan Dewan Komisaris	28
2.2 Penelitian Terdahulu	29
2.3 Kerangka Pemikiran	36
2.4 Pengembangan Hipotesis	37
2.4.1 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pembentukan RMC	37
2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pembentukan RMC	38
2.4.3 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Pembentukan RMC	39

2.4.4 Pengaruh Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Pembentukan RMC	40
2.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC	41
2.4.6 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pembentukan RMC	42
2.4.7 Pengaruh Ketekunan Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
3.1.1 Variabel Penelitian	44
3.1.2 Definisi Operasional Variabel	45
3.1.2.1 Variabel Dependen	45
3.1.2.2 Variabel Independen	46
3.1.2.3 Variabel Kontrol	50
3.2 Populasi dan Sampel	51
3.3 Jenis dan Sumber Data	52
3.4 Metode Pengumpulan Data	52
3.5 Metode Analisis	52
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif	52
3.5.2 <i>Logistic Regression</i> (Regresi Logistik)	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	58

4.2 Analisis Data	59
4.2.1 Statistik Deskriptif	60
4.2.2 Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit</i>)	63
4.2.3 Uji Kelayakan Keseluruhan Model (<i>Overall Fit Model Test</i>)	64
4.2.4 Koefisien Determinasi (R^2)	65
4.2.5 Tabel Klasifikasi	66
4.2.5 Uji Multikolonieritas	67
4.3 Uji Hipotesis	68
4.3.1 Independensi Komite Audit	70
4.3.2 Ukuran Komite Audit	71
4.3.3 Aktivitas Komite Audit	71
4.3.4 Keahlian Akuntansi atau Keuangan	71
4.3.5 Ukuran Dewan Komisaris	72
4.3.6 Proporsi Komisaris Independen	72
4.3.7 Aktivitas Dewan Komisaris	72
4.3.8 Variabel Kontrol	73
4.4 Pembahasan Hipotesis	73
4.4.1 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pembentukan RMC	73
4.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pembentukan RMC	74

4.4.3 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Pembentukan RMC	75
4.4.4 Pengaruh Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit Terhadap Pembentukan RMC	76
4.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC	76
4.4.6 Pengaruh Proporsi Komisaris Independensi terhadap Pembentukan RMC	77
4.4.7 Pengaruh Aktivitas Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC.....	78
4.4.8 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pembentukan RMC	79
BAB V PENUTUP	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Keterbatasan Penelitian	82
5.3 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN – LAMPIRAN	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Proses Seleksi Sampel	59
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi	60
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif	61
Tabel 4.4 Uji Kelayakan Model	64
Tabel 4.5 Perbandingan Nilai -2LL Awal dengan -2LL Akhir	64
Tabel 4.6 <i>Omnibus Test of Model Coefficients</i>	65
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi	66
Tabel 4.8 Tabel Klasifikasi	66
Tabel 4.9 Korelasi Antar Variabel	68
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Hipotesis	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran	36
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel	89
Lampiran B Hasil Analisis Regresi logistik	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis keuangan dan kehancuran yang tak terduga dari banyak perusahaan dan bank di Amerika Serikat telah mengakibatkan berbagai konsekuensi seperti kegiatan ekonomi berkurang, hilangnya kepercayaan publik, dan sistem keuangan tidak stabil. Banyak faktor yang mungkin telah berkontribusi terhadap kerapuhan tersebut, salah satunya adalah pengambilan risiko yang berlebihan. Brown *et al* (2009) menyatakan bahwa lingkungan yang kompetitif akan membentuk dan mendorong perubahan pasar sehingga mengintensifkan persaingan antara perusahaan dan akan mengarahkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengambil lebih banyak risiko dari waktu ke waktu. Sehingga sangat penting untuk selalu meningkatkan pemantauan dan penilaian risiko.

Untuk mewujudkan program manajemen risiko yang efektif, diperlukan peran dewan Komisaris (Krus dan Orowitz, 2009). Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan karena bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen perusahaan (KNKG, 2006). Dewan komisaris memiliki tugas yang sangat luas karena merupakan komponen inti dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk meringankan tugasnya dewan komisaris dapat membentuk komite-komite. Salah satunya adalah komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris dalam menjamin kualitas pelaporan

keuangan perusahaan dengan cara mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan (Pamudji dan Triharti, 2009).

Menurut peraturan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 salah satu tugas komite audit adalah melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. Berdasarkan pada perubahan peraturan, ruang lingkup komite audit telah diperluas untuk mengangkat manajemen risiko dan pengendalian internal (Hock Ng *et al.*, 2012). Oleh sebab itu, komite audit perlu mengenal manajemen risiko agar dapat mengoptimalkan pemeriksaan dan fungsi keseimbangan.

Sejak terjadinya skandal keuangan yang terjadi pada perusahaan Enron dan Worldcom, peran komite audit telah menjadi sorotan publik. Menurut Zaman (2001) beberapa literatur menyatakan keraguan terhadap kemampuan komite audit untuk dapat menyediakan sebuah manajemen risiko yang efektif. Merupakan hal yang tidak masuk akal jika mengharapkan komite audit melakukan kinerja lebih tinggi dalam *review* tertentu karena kurangnya keahlian dan waktu, terutama setelah tambahan tanggung jawab dibebankan pada mereka melalui berbagai kode tata kelola perusahaan dan peraturan legislatif (Zaman, 2001). Padahal pengawasan manajemen risiko umumnya membutuhkan pemahaman yang signifikan dari struktur organisasi yang berkembang luas dan proses serta risiko yang terkait (Subramaniam *et al.*, 2009).

Hal inilah yang kemudian menjadi landasan beberapa perusahaan untuk membentuk suatu komite yang dapat membantu komite audit dalam hal manajemen risiko yang disebut sebagai *Risk Managemet Committee* (RMC).

Sebelumnya beberapa perusahaan membentuk RMC yang tergabung dengan komite audit. Namun suatu RMC yang tergabung dengan komite audit tidak hanya mengawasi manajemen risiko tetapi secara aktif juga terlibat dalam pelaporan keuangan dan pengawasan fungsi audit (Alles *et al*, 2005). Oleh karena itu, kendala waktu dan ketidakefisienan lebih mungkin terjadi dalam komite gabungan yang kemudian akan menghambat keinginan dan kemampuan anggota komite audit dalam melakukan *review* yang lebih ketat (Yatim, 2009).

Risk Management Committee (RMC) didefinisikan sebagai sub-komite dari dewan yang memberikan pendidikan manajemen risiko perusahaan, menetapkan *buy-in* di tingkat dewan untuk *appetite risk* dan strategi risiko, mengembangkan “kepemilikan” pengawasan manajemen risiko oleh dewan, dan laporan ulasan risiko dari perusahaan (KPMG, 2001). Komite tersebut berpotensi menjadi sumber daya yang penting untuk dewan dalam memenuhi tanggung jawab manajemen risiko. Namun, bukti empiris tentang pembentukan dan sifat RMC masih sedikit dan terbatas (Subramaniam, 2009). Salah satu bukti empiris tentang pembentukan RMC adalah sebuah survei yang dilakukan oleh KPMG (2005) pada 80 direksi dan eksekutif senior dari 200 top perusahaan ASX/NZSX, berbagai pemerintahan dan organisasi swasta di Australia dan Selandia Baru. Survei ini mengungkapkan bahwa lebih dari setengah responden telah mendirikan RMC. Dari jumlah tersebut, 70 persen diintegrasikan dengan dewan komite audit dan 55 persen termasuk ke dalam direktur independen. Namun, temuan penelitian masih deskriptif, dengan sedikit informasi pada faktor-faktor yang menentukan

keputusan suatu organisasi untuk mendirikan RMC dan mengungkapkan keberadaannya di laporan tahunan.

Di Indonesia pembentukan RMC masih jarang. Hanya perusahaan perbankan saja yang sudah diwajibkan untuk membentuk RMC. Di perusahaan perbankan, RMC dikenal dengan nama Komite Pemantau Risiko. Pembentukan komite pemantau risiko diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor: 8/4/PBI/2006 yang kemudian disempurnakan dengan peraturan Bank Indonesia nomor: 8/14/PBI/2006.

Berbeda dengan pembentukan RMC di perusahaan finansial yang sudah bersifat wajib, hingga saat ini pembentukan RMC di perusahaan non finansial masih bersifat *voluntary*. Sebagian besar perusahaan non finansial mendelegasikan tugas manajemen risiko pada dewan komisaris atau komite audit sehingga hanya beberapa perusahaan saja yang sudah membentuk RMC. Padahal untuk mewujudkan manajemen risiko yang efektif diperlukan suatu komite yang hanya fokus penuh pada pengawasan risiko dan tidak berbagi fokus dengan pemenuhan standar akuntansi (Krus dan Orowitz, 2009). Menurut Subramaniam *et al* (2009) RMC dapat meringankan tugas dewan dalam pengawasan risiko karena mereka dapat mencurahkan waktu lebih banyak untuk memantau risiko dan mengevaluasi pengendalian terhadap risiko tersebut. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam beberapa waktu terakhir semakin kuat menciptakan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Bank Dunia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 adalah sebesar 6,1 persen dan pertumbuhan ini merupakan nomor dua di Asia setelah China (Sekretariat Kabinet

RI, 2012). Persaingan bisnis yang semakin ketat menyebabkan perusahaan semakin berani mengambil risiko demi kelangsungan usahanya. Meningkatnya risiko bisnis juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap tingkat pengawasan risiko demi tercapainya tujuan perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Oleh sebab itu, pembentukan sebuah komite yang hanya berfokus pada pengelolaan risiko yaitu komite manajemen risiko sangat diperlukan.

Hingga saat ini masih banyak perdebatan diantara kalangan bisnis dan media massa mengenai bagaimana pendekatan manajemen risiko, bagaimana menerapkannya, faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilannya dan faktor apa yang membatasi keefektifannya (Staniec, 2011). Penelitian mengenai manajemen risiko masih sedikit dilakukan meskipun kesadaran terhadap manajemen risiko semakin meningkat. Masih minimnya penelitian dalam pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan, memotivasi penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mungkin mengarah pada pembentukan komite manajemen risiko (RMC).

Salah satu penelitian tentang pembentukan RMC dilakukan oleh Yatim (2009) yang meneliti mengenai pengaruh karakteristik komite audit terhadap pembentukan RMC. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non finansial yang terdaftar di *Main Board* dan *Second Board* Bursa Malaysia pada tahun 2003 dengan jumlah sampel sebanyak 690 perusahaan. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran komite audit dan Independensi komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. Selain itu, penelitian ini juga

membuktikan bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC.

Wulandari (2012) juga melakukan penelitian yang sama pada perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010. Sampel penelitiannya berjumlah 178 dan dianalisis dengan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan ketekunan komite audit serta variabel kontrol ukuran perusahaan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Penelitian Kusuma (2012) meneliti hubungan karakteristik dewan komisaris terhadap pembentukan RMC. Hasil penelitian Kusuma menunjukkan bahwa keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit dipengaruhi oleh variabel kontrol ukuran perusahaan sedangkan untuk RMC yang terpisah dari komite audit dipengaruhi oleh frekuensi rapat dewan komisaris dan variabel kontrol ukuran perusahaan. Liew *et al* (2012) juga meneliti hubungan karakteristik dewan terhadap pembentukan RMC secara sukarela dengan hasil penelitian ukuran dewan dan jumlah direktur dari pihak luar memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC sukarela. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut terdapat perbedaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC sehingga mendorong penelitian selanjutnya untuk mencoba meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat ketaatan implementasi *Good Corporate Governance* di dalam perusahaan karena RMC adalah salah satu bagian dari struktur *Good Corporate Governance*.

Faktor yang akan diteliti adalah karakteristik komite audit dan karakteristik dewan komisaris. Selain itu, juga akan diteliti karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol untuk mengurangi bias penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan non finansial karena pembentukan RMC di perusahaan non finansial masih bersifat voluntary. Data yang digunakan adalah data perusahaan non finansial di Indonesia yang terdaftar di Bloomberg tahun 2009-2011. Bloomberg merupakan media penyedia data-data perusahaan yang memiliki data terintegrasi, lebih lengkap serta lebih bersifat global. Pemilihan tahun 2009-2011 karena ingin mengetahui kebijakan manajemen risiko seperti apa yang ditetapkan pasca krisis 2008 dan juga karena tahun tersebut menggambarkan profil perusahaan terkini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka judul penelitian ini adalah **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan *Risk Management Committee* (RMC).**

1.2 Rumusan masalah

Pada penelitian sebelumnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee* (RMC) dalam suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah independensi komite audit berpengaruh positif terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?

3. Apakah ketekunan komite audit berpengaruh positif terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
4. Apakah keahlian akuntansi atau keuangan komite audit berpengaruh positif terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
6. Apakah proporsi komisaris independen pada dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?
7. Apakah ketekunan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

1. Hubungan independensi komite audit terhadap pembentukan RMC
2. Hubungan ukuran komite audit terhadap pembentukan RMC
3. Hubungan ketekunan komite audit terhadap pembentukan RMC
4. Hubungan keahlian akuntansi atau keuangan komite audit terhadap pembentukan RMC
5. Hubungan ukuran dewan komisaris terhadap pembentukan RMC
6. Hubungan proporsi komisaris independen terhadap pembentukan RMC
7. Hubungan ketekunan dewan komisaris terhadap pembentukan RMC

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu akuntansi dan juga diharapkan dapat memberikan ide dan gagasan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengungkapan pengelolaan risiko.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor maupun kreditor untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit kepada perusahaan yang memiliki pelaporan risiko.

3. Bagi Manajemen perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman tentang pengungkapan risiko untuk membantu memperbaiki praktek pengungkapan risiko di perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini mengemukakan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data serta analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan deskripsi uji penelitian, analisis data, dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara dua pihak, dimana terdapat pihak (*principal*) yang mendelegasikan tugas kepada pihak lain (agen). *Principal* memberikan wewenang kepada agen untuk menjalankan perusahaan agar mencapai tujuan yang diharapkan. Hubungan ini menjadi suatu masalah ketika masing-masing pihak lebih mengutamakan kepentingannya. Asimetri informasi dapat terjadi karena agen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan lebih banyak mengetahui informasi perusahaan daripada *principal*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat dua masalah yang dapat timbul akibat terjadinya ketidakseimbangan informasi ini, yaitu :

1. Moral Hazard, merupakan permasalahan yang muncul apabila agen tidak mematuhi kontrak kerja yang telah disepakati
2. *Adverse selection*, merupakan suatu keadaan ketika *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Masalah keagenan ini dapat menimbulkan biaya keagenan, yaitu biaya pengorbanan agar agen bertindak sesuai kepentingan *principal*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat tiga komponen biaya keagenan. Yang pertama

biaya pengawasan (*monitoring cost*) yaitu biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk membatasi perilaku agen yang mementingkan kepentingannya. Komponen kedua adalah biaya yang dikeluarkan agen sebagai jaminan bagi prinsipal agar agen tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan prinsipal, misalnya insentif kepegawaian. Komponen biaya ketiga adalah kerugian residual (*residual loss*) yaitu nilai uang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami prinsipal akibat tindakan agen yang menyimpang dari tujuan perusahaan. Biaya keagenan merupakan jumlah dari ketiga komponen biaya tersebut.

Munculnya biaya keagenan disebabkan adanya upaya pengawasan dari *principal* untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan dengan agen. Untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan dengan agen, mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan *Good Corporate Governance (GCG)*. Pengawasan merupakan salah satu komponen *Good Corporate Governance*. Perusahaan dengan kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik dari manajemen.

Untuk mewujudkan pengawasan yang baik perlu dibentuk komite-komite pengawas yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan dapat membantu pekerjaan dewan komisaris. Komite tersebut antara lain komite audit dan *Risk Management Committee (RMC)* atau komite manajemen risiko. Dengan adanya kedua komite tersebut perusahaan dapat semakin meningkatkan keefektifannya sehingga meningkatkan *Good Corporate Governance* dan diharapkan dapat mengurangi biaya keagenan.

2.1.2 Risiko

Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat memberikan suatu keuntungan atau kerugian. Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang dapat memberikan dampak negatif (kerugian). Meskipun banyak orang yang mencoba untuk mendefinisikan risiko namun tidak ada satu definisi mengenai risiko yang telah dibakukan. Menurut Tampubolon (2005) di dalam bidang manajemen dan penyusunan strategi, risiko didefinisikan sebagai sebuah rentang (*Continuum*) yang dapat bergerak ke arah ancaman dengan dampak negatif, yaitu tidak tercapainya tujuan, atau kesempatan dengan dampak positif, yaitu tercapainya tujuan yang ditetapkan, disertai berbagai tingkat kemungkinan terjadinya ancaman maupun peluang tersebut.

Risiko yang dijumpai dalam suatu perusahaan disebut risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko yang diasumsikan perusahaan dapat memberikan keuntungan kompetitif (*Competitif advantage*) dan menambah nilai bagi para shareholder. Risiko bisnis terdiri dari tujuh kategori, yaitu Risiko strategis, risiko keuangan, risiko pasar, risiko operasional, risiko teknikal, risiko komersil dan risiko reputasi (Alijoyo, 2004 dalam Wulandari, 2012).

2.1.3 Manajemen Risiko

Risiko bisnis jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan suatu kerugian yang signifikan bahkan dalam beberapa situasi dapat menyebabkan kehancuran organisasi. Oleh sebab itu, untuk mengurangi dampak buruk dari risiko maka diperlukan suatu manajemen risiko yang baik dan efektif. Menurut

Hanafi (2009) manajemen risiko ini bertujuan untuk mengelola risiko sehingga organisasi bisa bertahan atau mungkin mengoptimalkan risiko. Perusahaan seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu, karena melihat potensi keuntungan dibalik risiko tersebut.

Menurut COSO (*The Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commision*) (2004) manajemen risiko perusahaan adalah :

A process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and accross the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objevtives.

Definisi ini mencakup dasar konsep-konsep utama mengenai bagaimana perusahaan dan organisasi lain mengelola risiko, memberikan dasar untuk aplikasi di dalam organisasi, industri dan sektor-sektornya. Hal ini berfokus langsung pada pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh entitas tertentu dan memberikan dasar untuk menentukan efektivitas manajemen risiko perusahaan. Menurut Djojosoedarso (1999) manajemen risiko mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, mengkoordinir, dan mengawasi serta mengevaluasi program penanggulangan risiko.

Adanya program penanggulangan risiko yang baik dapat memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan operasi perusahaan (Djojosoedarso, 1999). Meskipun secara ekonomis tidak meningkatkan keuntungan perusahaan namun hal itu akan sangat bermanfaat untuk pengelolaan usaha di masa depan. Suatu sistem manajemen risiko yang efektif dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat menjaga

reputasi perusahaan (Subramaniam *et al.*, 2009). Oleh karena itu, demi terciptanya sistem manajemen risiko yang efektif diperlukan aspek pengawasan yang terstruktur dan handal.

2.1.4 Good Corporate Governance

Menurut Keputusan Menteri BUMN No: KEP-117/M-MBU/2002, *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, yang berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. *Good Corporate Governance (GCG)* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, GCG diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan *agency cost*.

Pelaksanaan GCG memiliki lima tujuan utama yaitu: melindungi hak dan kepentingan shareholder, melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non shareholder, meningkatkan efisiensi dan eektivitas kerja dewan pengurus atau dewan direktur dan manajemen perusahaan, serta meningkatkan mutu hubungan dewan direktur dengan manajemen senior perusahaan (Sugiarto,

2006). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan penegakan GCG adalah kualitas dewan komisaris sebagai pengawas. Dewan komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan kepada dewan direksi dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta berkontribusi dalam proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan relevan bagi *Stakeholder*.

2.1.5 Risk Management Committee (RMC)

Risk Management Committee (RMC) merupakan sebuah unit yang sebelumnya dianggap kurang berarti, namun sekarang menjadi bagian dari Dewan komisaris yang kinerjanya sangat dibutuhkan (Hock Ng *et al.*, 2012). Banyaknya skandal keuangan yang terjadi akhir-akhir ini dan terjadinya krisis global pada tahun 2008 menyebabkan kesadaran para pelaku bisnis akan pentingnya manajemen risiko semakin meningkat. Hal inilah yang kemudian mendorong mereka untuk membentuk *Risk Management Committee (RMC)* atau Komite Manajemen risiko.

Pada sebagian besar perusahaan, tugas pengawasan Manajemen risiko diberikan kepada komite audit. Peraturan Bapepam yang tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa salah satu tugas komite audit adalah melaporkan kepada dewan komisaris mengenai berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. Namun, beberapa literatur menyatakan keraguan mereka terhadap

kemampuan komite audit untuk menyediakan sebuah manajemen risiko yang efektif. Menurut Zaman (2001) merupakan hal yang tidak masuk akal jika mengharapkan komite audit melakukan kinerja lebih tinggi dalam review tertentu karena kurangnya keahlian dan waktu, terutama setelah tambahan tanggung jawab dibebankan pada mereka dengan berbagai kode tata kelola perusahaan dan peraturan legislatif. Padahal perusahaan memerlukan suatu komite yang memberikan perhatian penuh pada pengawasan risiko dan tidak berbagi fokus pada pemenuhan standar akuntansi karena pentingnya pengawasan risiko dan adanya beragam risiko yang mungkin terjadi (Krus dan Orowitz, 2009). Hal inilah yang kemudian menjadi alasan bagi perusahaan untuk mendirikan *Risk Management Committee (RMC)*.

Risk Management Committee (RMC) bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan membantu mereka dalam seluruh aspek pengawasan manajemen risiko perusahaan. Menurut Subramaniam, *et al* (2009) RMC dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam meringankan tanggung jawab dewan terhadap pengawasan risiko, manajemen risiko dan pengendalian internal. Dengan pembentukan RMC ini diharapkan komite tersebut dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menyatukan berbagai risiko dan mengevaluasi pengendalian yang berhubungan secara keseluruhan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2011), pemantauan pelaksanaan manajemen risiko mencakup hal-hal berikut:

1. Pemantauan terhadap perubahan: proses manajemen risiko hendaknya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi lainnya.

Dengan demikian, dinamika manajemen risiko akan mengikuti dinamika perubahan yang terjadi pada proses organisasi dan lingkungan organisasi itu sendiri.

2. Pemantauan kinerja manajemen risiko: pemantauan khususnya ditujukan pada risiko-risiko yang tinggi dan kritis. Pemantauan difokuskan pada efektivitas pengendalian risikonya. Harus selalu dipantau bagaimana keandalan operasi pengendalian tersebut, bagaimanakah kemungkinan deteksi dini terhadap risiko tersebut, baik keandalan maupun kerentanannya dan lain-lain.
3. Kemungkinan timbulnya risiko-risiko baru akibat dilaksanakannya suatu tindakan perlakuan risiko yang baru. Hal ini karena suatu risiko dapat mempunyai dampak risiko lainnya (*chain reaction*).

2.1.6 RMC di Perusahaan Perbankan

RMC di Perusahaan Perbankan dikenal dengan nama Komite Pemantau Risiko (KPR). Pembentukan KPR ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006. Pada pasal 12 disebutkan bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris wajib membentuk setidaknya: komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa anggota KPR setidaknya terdiri dari seorang komisaris independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Tugas KPR adalah melakukan evaluasi tentang kesesuaian

antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

2.1.7 Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep *Good Corporate Governance* yang penerapannya diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi bagi perusahaan. Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada *shareholder dan stakeholder*.

Komite audit memainkan peran monitoring yang penting yaitu menjamin kualitas pelaporan keuangan dan akuntabilitas perusahaan serta berfungsi sebagai mekanisme *Governance* yang penting karena adanya potensi risiko litigasi dan penurunan reputasi komite audit sehingga penting untuk memastikan anggota komite audit akan melaksanakan tanggung jawab mereka secara aktif. Peraturan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. The Institute of Internal Auditors (IIA) dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2002) juga merekomendasikan setiap perusahaan publik untuk memiliki komite audit sebagai komite tetap agar dapat membantu meringankan tugas dewan komisaris.

Secara umum, tujuan pembentukan komite audit adalah untuk membantu tugas-tugas dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berperan untuk mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal dan audit eksternal. KNKG menetapkan tiga garis besar tujuan dibentuknya komite audit, yaitu: (1) Pelaporan Keuangan, (2) Manajemen Risiko dan Kontrol serta (3) *Corporate Governance*.

Persyaratan pembentukan komite audit dalam suatu perusahaan tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 peraturan nomor IX.I.5 persyaratan keanggotaan komite audit diantaranya:

- 1) Anggota komite audit harus memiliki suatu keseimbangan ketrampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas.
- 2) Anggota komite audit harus independen, objektif dan profesional.
- 3) Anggota komite audit harus mempunyai integritas, dedikasi, pemahaman yang baik tentang organisasi dan lingkungan bisnisnya serta pemahaman mengenai risiko dan kontrol.
- 4) Paling sedikit satu anggota komite audit harus mempunyai pemahaman yang baik tentang pelaporan keuangan.
- 5) Ketua komite audit harus mempunyai kemampuan untuk memimpin dan keterampilan berkomunikasi dengan baik.

Selain itu, Bapepam menambahkan persyaratan bagi komite audit yaitu bahwa anggota komite audit merupakan pihak yang tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten,

dan tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten.

Komite audit yang memenuhi syarat-syarat tersebut diharapkan mampu memberikan level pengawasan yang lebih baik dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi dewan komisaris dan terutama untuk perusahaan. Salah satunya dengan merekomendasikan pembentukan RMC, karena RMC ini dapat membantu komite audit dalam melakukan tugas-tugas yang bersifat spesifik dan membutuhkan fokus penuh dalam mengerjakannya khususnya dalam pengawasan manajemen risiko. RMC dapat membantu komite audit dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam hal pengawasan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2.1.7.1 Independensi komite Audit

Independensi merupakan salah satu faktor yang penting bagi keefektifan kinerja komite audit. Menurut perspektif agensi, komite audit yang independen dapat menyediakan pemantauan efektif dan membantu memperkuat kontrol internal (Yatim, 2009). Selain itu, anggota Komite Audit Independen cenderung untuk memperlihatkan kinerja yang lebih baik kepada perusahaan sebagai sarana meningkatkan reputasi mereka (Fama dan Jensen, 1983, Gilson, 1990 dalam Yatim, 2009). Independensi ini diharapkan dapat memelihara integritas serta pandangan yang obyektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit. Selain itu, dengan independensi diharapkan masing-

masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain (Komite Nasional Kebijakan Governance [KNKG], 2006).

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa kedudukan komite audit berada di bawah dewan komisaris dan salah seorang komisaris independen sekaligus menjadi ketua komite audit. Syarat untuk menjadi komite audit diantaranya adalah berasal dari pihak yang tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, tidak memiliki saham dalam perusahaan, tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan dan tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut. Persyaratan tersebut ditetapkan untuk menjaga independensi dari komite audit

2.1.7.2 Ukuran (size) Komite audit

Jumlah anggota komite audit menunjukkan seberapa besar sumber daya yang dialokasikan perusahaan untuk melakukan pengawasan dan menghadapi berbagai permasalahan perusahaan. Menurut FCGI (2002) jumlah komite audit yang efektif adalah berjumlah 3-5 orang. Sedangkan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Szczepankowski (2012) menyatakan bahwa ukuran komite audit yang optimal ada pada rentang 7-9 orang. Braiotta (2000) dalam Wulandari (2012) menyatakan bahwa secara umum, komite audit seharusnya cukup luas untuk memiliki anggota dengan bauran pertimbangan bisnis dan pengalaman yang baik asalkan tidak memberatkan.

Di Indonesia, perusahaan *go public* diwajibkan memiliki komite audit dengan Jumlah minimal tiga orang. Dari jumlah tersebut mayoritas harus bersifat Independen. Menurut Yatim (2009) ukuran komite audit sejalan dengan keinginan perusahaan untuk meningkatkan status perusahaan mereka. Diasumsikan bahwa semakin besar ukuran komite audit, perusahaan menginginkan peningkatan pengawasan sehingga menyebabkan tugas komite audit semakin bertambah. Oleh sebab itu, komite audit akan mendukung pembentukan RMC untuk meringankan tugas mereka.

2.1.7.3 Aktivitas Komite Audit

Aktivitas komite audit dalam penelitian ini merupakan frekuensi rapat yang dilakukan komite audit. Komite audit berperan sebagai penghubung komunikasi antara manajemen dengan auditor internal dan eksternal. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, komite audit dapat mengadakan rapat secara periodik sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri. Dengan sering bertemu, misalnya dengan auditor eksternal dan manajer, komite audit dapat menginformasikan dan menambah pengetahuan tentang masalah akuntansi dan manajemen risiko di dalam perusahaan. Kolaborasi antara komite audit dan manajemen perusahaan dapat meningkatkan pengembangan pendekatan manajemen risiko untuk menyediakan aliran informasi kepada pembuat keputusan perusahaan (Sutaryo dkk., n.d).

Abbott, *et al* (2000) menyatakan bahwa frekuensi rapat komite audit yang lebih besar berhubungan dengan penurunan kecurangan dan agresivitas

pelaporan keuangan. Frekuensi rapat komite audit diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan pengawasan perusahaan. Menurut Yatim (2009) komite audit yang menunjukkan ketekunan/aktivitas yang lebih besar dalam melaksanakan pengawasan tanggung jawab kemungkinan akan meningkatkan tingkat pengawasan kegiatan manajemen risiko perusahaan.

2.1.7.4 Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit

Keahlian akuntansi dan keuangan yang dimiliki Komite Audit merupakan hal yang penting untuk menilai efektivitas dari kinerja mereka. Menurut Lisic, *et al* (2011) perusahaan dengan komite audit yang memiliki keahlian keuangan dapat membangun tata kelola perusahaan dan ketelitian pemantauan proses akuntansi yang lebih baik sehingga diharapkan dapat memperbaiki masalah pelaporan keuangan dengan tepat waktu.

Bapepam dalam Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa anggota komite audit sekurang-kurangnya terdapat satu orang yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. FCGI (2002) menyatakan anggota komite audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan keuangan, serta memiliki suatu keseimbangan ketrampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Keahlian akuntansi dan keuangan sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pengawasan mereka. Berbagai literatur mensyaratkan setidaknya satu anggota komite audit harus mempunyai keahlian akuntansi atau keuangan. Kedua keahlian itu biasanya dinilai dari latar belakang pendidikan dan pengalaman anggota komite audit.

Menurut *US Securities Exchange Commission* (2003) seksi 407 keahlian keuangan adalah (a) Pemahaman atas *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP) dan laporan keuangan, (b) pengalaman mengaplikasikan GAAP dalam hubungannya dengan estimasi untuk akuntansi, akrual dan penyajian laporan keuangan, (c) Pengalaman dalam persiapan atau pengauditan laporan keuangan terbitan yang dapat dibandingkan secara umum, (d) pengalaman dengan kontrol internal akuntansi; dan (e) pemahaman fungsi komite audit. Keahlian keuangan dan akuntansi juga dapat ditentukan oleh tingkat pendidikan formal yang dimiliki komite audit. Semakin tinggi jenjang pendidikan anggota komite, semakin luas pengetahuan yang dimiliki sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat terutama dalam masalah pengawasan proses pelaporan keuangan perusahaan.

2.1.8 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah salah satu faktor yang penting untuk keberhasilan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)*. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Menurut KNKG (2006), agar pelaksanaan GCG dapat berjalan secara efektif perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu bertintegrasikan dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- 3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara

Dewan komisaris dapat membentuk komite-komite tertentu untuk meringankan tugasnya yang begitu luas. Komite-komite tersebut diantaranya yaitu komite audit dan komite manajemen risiko. Para komite ini lebih berfokus pada satu bidang sehingga hasil pekerjaannya diyakini lebih akurat. Kinerja dari komite-komite ini akan sangat mempengaruhi hasil keputusan dewan komisaris.

2.1.8.1 Ukuran (Size) Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris dalam hal ini adalah jumlah atau banyaknya anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006). Menurut Indrayati (2010) jumlah dewan yang besar dapat memberikan keuntungan atau kerugian terhadap perusahaan. Jumlah anggota dewan komisaris setidaknya harus sama atau bahkan lebih besar dengan jumlah anggota dewan direksi, karena apabila

jumlah anggota dewan direksi lebih besar dibandingkan jumlah anggota dewan komisaris, maka kemungkinan dewan komisaris akan mendapat tekanan psikologis ketika terjadi perbedaan pendapat antara kedua pihak tersebut sehingga akan berdampak pada kualitas keputusan dan kebijakan perusahaan. Apabila jumlah anggota dewan komisaris terlalu sedikit dikhawatirkan akan menyebabkan kualitas keputusan yang rendah dan pengawasan terhadap keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat juga rendah.

2.1.8.2 Proporsi Komisaris Independen

Menurut peraturan Bapepam Nomor SE-03/PM/2004 menyatakan bahwa sepertiga anggota dewan komisaris harus merupakan komisaris independen artinya tidak memiliki hubungan, baik hubungan bisnis maupun hubungan keluarga, dengan pemilik perusahaan tersebut. Tujuan adanya komisaris independen ini adalah agar dewan komisaris dapat mengambil keputusan secara efektif, *fair* dan mengutamakan kepentingan Stakeholder.

Menurut KNKG (2006) dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan GCG. Karena tugas utama komisaris adalah mengawasi dewan direksi maka diperlukan independensi agar dalam mengontrol perusahaan dewan komisaris tidak mudah terintervensi oleh pihak-pihak tertentu.

Bursa efek Indonesia melalui Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No: Kep-305/BE/07-2004 di dalam pencatatan efek No 1-A: tentang Ketentuan Umum

Pencatatan Saham dan Efek yang bersifat ekuitas di bursa, dalam angka III.1.4. menyebutkan bahwa jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota komisaris. Dalam peraturan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 ditentukan persyaratan komisaris independen yaitu tidak memiliki hubungan terafiliasi, baik dengan pemegang saham pengendali, direktur atau komisaris lainnya, tidak bekerja rangkap dengan perusahaan terafiliasi dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2.1.8.3 Aktivitas Dewan Komisaris

Aktivitas dewan dalam hal ini adalah frekuensi pertemuan yang dilakukan dewan komisaris. Meskipun ada beberapa komponen untuk ketekunan, penelitian sebelumnya (Liew *et al.*, 2012 dan Yatim 2010), umumnya menggunakan jumlah rapat dewan sebagai proxy untuk aktivitas dewan karena metrik kuantitatif lain dari aktivitas dewan tidak umum diamati. Pertemuan dewan yang lebih sering berpotensi untuk meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi pengendalian internal dan memungkinkan dewan komisaris untuk menjadi lebih efektif dalam pengawasan mereka.

Dewan komisaris sebagai pusat pelaksana pengendalian internal perusahaan yang memiliki peran serta fungsi pengawasan, harus secara kontinu mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan sehingga diperlukan jumlah pertemuan yang cukup sering. Menurut Yatim (2010) dewan komisaris yang menunjukkan aktivitas lebih tinggi akan lebih rajin dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan meningkatkan tingkat pengawasan dari aktivitas manajemen

risiko sehingga cenderung akan mendukung pembentukan Komite manajemen risiko (RMC).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai keberadaan RMC di suatu perusahaan sudah cukup banyak dilakukan. Namun pada penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar peneliti menggunakan variabel independen karakteristik dewan komisaris. Masih belum banyak penelitian yang meneliti pengaruh karakteristik komite audit terhadap Pembentukan RMC. Penelitian terdahulu yang menghubungkan pembentukan RMC dengan karakteristik dewan komisaris antara lain Subramaniam, *et al* (2009), Chen, *et al* (2009), Yatim (2010), Andarini dan Januarti (2010), serta Kusuma (2012). Sedangkan penelitian yang menghubungkan pembentukan RMC dengan karakteristik komite audit telah dilakukan oleh Yatim (2009) dan Wulandari (2012).

Chen, *et al* (2009) meneliti tentang pembentukan Komite Audit secara *voluntary*. Penelitian ini menemukan bahwa pembentukan komite audit secara *voluntary* berhubungan positif dan signifikan dengan *Cost of Debt*, ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi komisaris independen, dan CEO independen,. Namun, hubungan pembentukan komite audit dengan *fee non-audit* dari auditor eksternal bersifat negatif.

Subramaniam, *et al* (2009) menguji hubungan karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan dengan keberadaan RMC di suatu perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada tipe RMC yang tergabung dengan komite audit dan

tipe RMC yang terpisah dari komite audit atau berdiri sendiri. Penelitian ini dilakukan pada 200 perusahaan teratas yang terdaftar dalam *Australian Stock Exchange* (ASX). Hasil penelitiannya menemukan bahwa RMC cenderung dibentuk pada perusahaan yang memiliki ketua dewan independen dan ukuran dewan yang besar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan RMC terpisah memiliki ukuran dewan yang besar, risiko pelaporan keuangan yang lebih tinggi dan kompleksitas usaha yang rendah

Andarini dan Januarti (2010) melakukan penelitian serupa dengan Subramaniam *et al* (2009) dengan menggunakan sampel perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007 dan 2008. Hasil penelitiannya menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Yatim (2010) juga melakukan penelitian mengenai hubungan karakteristik Dewan Komisaris dengan pembentukan RMC. Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan menjadi variabel kontrol. Hasil penelitian menemukan bahwa semakin independen, ahli dan rajin dewan komisaris maka akan cenderung membentuk RMC. selain itu, Pembentukan RMC juga berhubungan positif dan signifikan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan, kompleksitas, dan penggunaan KAP Big Four (reputasi auditor).

Sebelum melakukan penelitian tersebut, Yatim (2009) telah melakukan penelitian mengenai hubungan karakteristik komite audit dengan pembentukan RMC. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit yang independen, memiliki jumlah anggota lebih banyak dan memiliki ketekunan yang tinggi

berhubungan positif dengan pembentukan RMC. Variabel kontrol ukuran perusahaan, kompleksitas dan penggunaan KAP Big Four juga berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Kusuma (2012) meneliti pengaruh karakteristik dewan komisaris dan karakteristik perusahaan terhadap pembentukan RMC pada perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2008 sampai 2010. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap keberadaan RMC yang tergabung dengan komite audit adalah variabel kontrol ukuran perusahaan. Sedangkan variabel yang mempengaruhi pembentukan RMC yang berdiri sendiri adalah variabel frekuensi rapat dewan komisaris dan variabel kontrol ukuran perusahaan.

Wulandari (2012) melakukan penelitian yang serupa dengan Yatim (2009) yaitu meneliti hubungan karakteristik komite audit terhadap pembentukan RMC. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2010. Hasil penelitian menemukan bahwa ukuran komite audit dan ketekunan komite audit berhubungan positif dengan pembentukan RMC. Selain itu, ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Liew, *et al* (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap pembentukan RMC yang bersifat *voluntary* di Malaysia. Penelitian dilakukan pada 797 perusahaan *Go Public* di Malaysia. Hasil penelitian menemukan bahwa Variabel ukuran dewan dan variabel *Outside Directorship* berhubungan positif dan signifikan dengan pembentukan RMC.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul	Variabel dependen	Variabel independen	Hasil
Chen <i>et al</i> (2009)	<i>Audit committees: Voluntary Formation by ASX non-Top 500</i>	Pembentukan Komite Audit secara sukarela	Leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan, komisaris independen, CEO independen, auditor eksternal, proporsi fee non-audit auditor eksternal, dan struktur kepemilikan	Pembentukan Komite Audit secara signifikan berhubungan positif dengan <i>cost of debt</i> , ukuran perusahaan, ukuran dewan, proporsi komisaris independen, dan CEO independen.
Subramaniam <i>et al</i> (2009)	<i>Corporate Governance, Firm Characteristic, and Risk Management Committee Formation in Australia Company</i>	Pembentukan RMC dan tipe RMC yang dibentuk	Karakteristik dewan yang meliputi CEO duality, komisaris independen dan ukuran dewan. Karakteristik perusahaan meliputi reputasi auditor, kompleksitas, tipe industri, leverage dan risiko pelaporan keuangan.	RMC lebih banyak dibentuk pada perusahaan dengan CEO independen dan ukuran dewan yang besar. RMC yang terpisah dari komite audit berhubungan positif dan signifikan dengan ukuran dewan dan risiko pelaporan keuangan

Yatim (2009)	<i>Audit Committee Characteristic and Risk Management of Malaysian Listed Firms</i>	Pembentukan RMC	Independensi, keahlian keuangan, ukuran, dan ketekunan komite audit	Pembentukan RMC berhubungan positif dengan independensi, ukuran dan ketekunan komite audit
Yatim (2010)	<i>Board Structures and The Establishment of a Risk Management Committee by Malaysian Listed Company</i>	Pembentukan RMC	Proporsi dewan non eksekutif, pemisahan kepala dewan dan posisi CEO, keahlian dewan dan ketekunan dewan	Proporsi Komisaris independen, CEO independen berhubungan positif dengan RMC yang berdiri sendiri. Perusahaan yang memiliki dewan yang lebih ahli dan rajin berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC
Andarini dan Januarti (2010)	Hubungan karakteristik dewan komisaris dan perusahaan terhadap keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan Go Public di Indonesia	Pembentukan RMC	Proporsi komisaris independen, ukuran dewan, auditor eksternal perusahaan, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, leverage dan ukuran perusahaan	Ukuran perusahaan secara signifikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC dan SRMC

Kusuma (2012)	Dampak Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap strukturisasi risk management committee	Pembentukan RMC dan SRMC	Proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, reputasi auditor, risiko pelaporan keuangan, leverage, profitabilitas, kompleksitas usaha dan ukuran perusahaan	Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. variabel frekuensi rapat dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan SRMC
Wulandari (2012)	Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Pembentukan <i>Risk Management Committee</i> (studi empiris pada perusahaan Non-Finansial di BEI)	Pembentukan RMC	Independensi, keahlian keuangan, ukuran dan ketekunan Komite Audit	Ukuran dan ketekunan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. Selain itu, variabel kontrol ukuran perusahaan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC

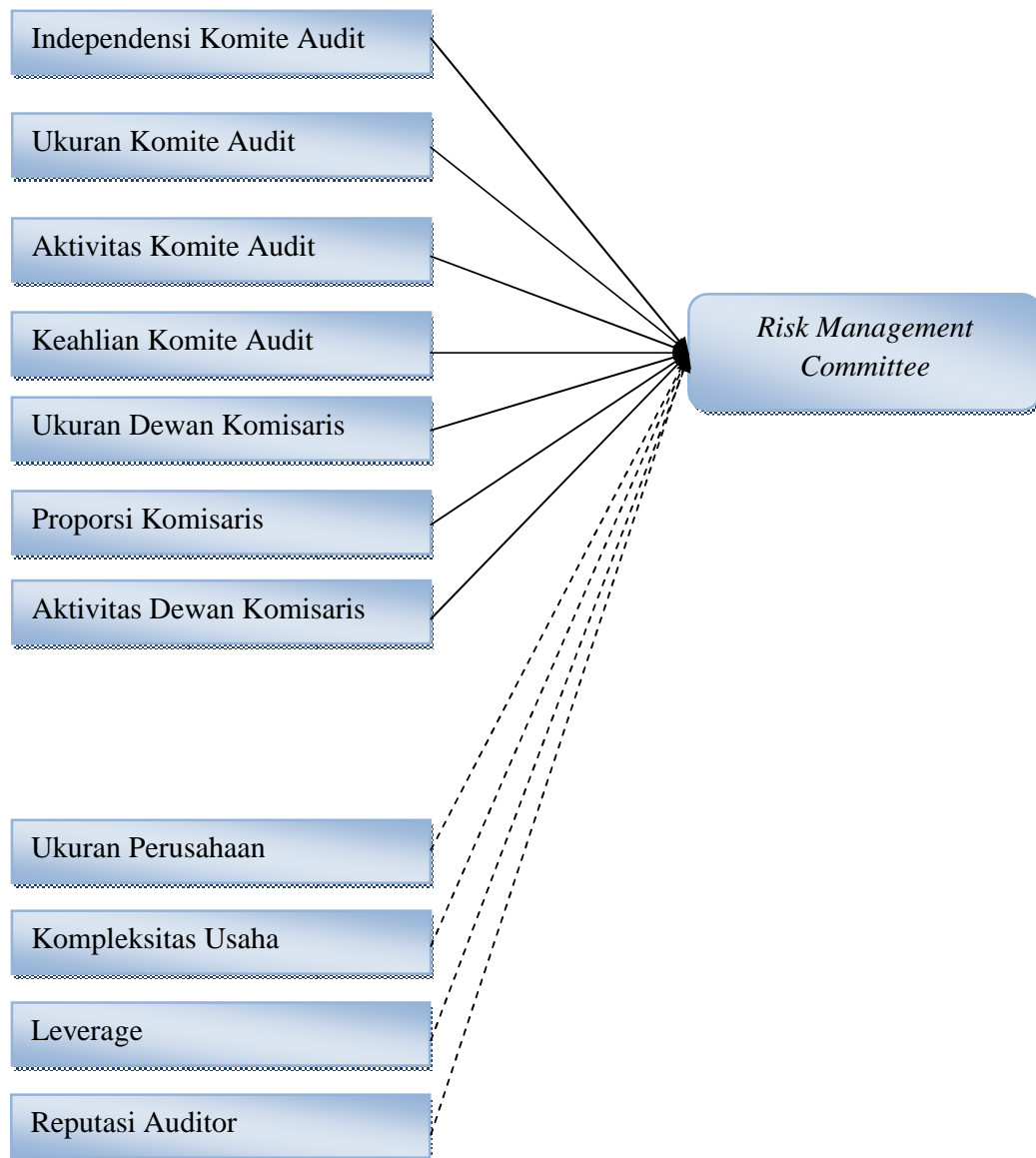
Liew <i>et al</i> (2012)	<i>Board of Directors and Voluntary Formation of Risk Management Committee : Malaysia Evidence</i>	Pembentukan RMC sukarela	Proporsi direktur independen, jumlah kepala dewan independen, jumlah direktur dari pihak luar (outside directorship), ukuran dewan, Ketekunan dewan dan keahlian dewan	Variabel ukuran dewan dan jumlah direktur dari pihak luar (outside directorship) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC sukarela
--------------------------	--	--------------------------	--	---

Sumber: diolah dari beberapa hasil penelitian

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan komite manajemen risiko (RMC). Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karakteristik komite audit yaitu independensi, ukuran (size), ketekunan dan keahlian komite audit serta karakteristik dewan komisaris yang terdiri dari ukuran, jumlah komisaris independen dan ketekunan dewan komisaris. Selain itu, terdapat variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas, leverage dan reputasi auditor. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pembentukan RMC

Terjadinya skandal akuntansi beberapa tahun terakhir menyebabkan wacana untuk meningkatkan efektivitas komite audit semakin banyak dibicarakan. Menurut Blue Ribbon Committee (BRC) pada tahun 1999 yang kemudian dikuatkan oleh Sarbanes Oxley Act for 2002 (SOX), salah satu elemen untuk meningkatkan efektivitas komite audit adalah independensi komite audit (Bronson et, al., 2009). Independensi bertujuan untuk menjaga integritas dan objektivitas komite audit dalam membuat laporan dan penyusunan rekomendasi bagi dewan perusahaan sehingga dapat mengurangi kecurangan pada pelaporan keuangan. Komite audit yang independen cenderung ingin menjaga reputasi mereka sehingga akan berusaha menyediakan pemantauan efektif dan membantu memperkuat kontrol internal (Abbot et, al., 2000). Untuk membantu meringankan tugas komite audit dalam pengawasan perusahaan maka dibutuhkan suatu komite khusus seperti komite manajemen risiko (RMC). Penelitian Yatim (2009) berhasil menunjukkan bahwa independensi komite audit berhubungan positif dan signifikan dengan pembentukan RMC. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan:

H1: Independensi Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pembentukan *Risk Management Committee (RMC)*

2.4.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pembentukan RMC

Berdasarkan teori keagenen, untuk dapat menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan antara prinsipal dan agen, komite audit harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang perusahaan agar dapat meningkatkan efektivitasnya. Ukuran komite audit adalah karakteristik lain yang relevan dengan keefektifan tugas komite audit. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komite audit yang besar cenderung untuk meningkatkan kekuatan dan status komite audit dalam suatu organisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pengendalian. Penambahan sumber daya dan meningkatnya status komite audit akan membuat komite audit lebih dapat memenuhi peran pengawasan dalam perusahaan (Domnisoru, 2011).

Menurut Braiotta (2000) dalam Yatim (2009) ukuran komite audit yang dianjurkan konsisten dengan keinginan untuk meningkatkan status organisasi komite audit. Jumlah anggota komite audit yang lebih besar cenderung mendukung pembentukan komite manajemen risiko karena jumlah yang semakin besar akan meningkatkan tanggung jawab pengawasan mereka. Penelitian Yatim (2009) berhasil menemukan bahwa ukuran komite audit berhubungan positif dan signifikan dengan pembentukan RMC. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikembangkan hipotesis berikut ini:

H2 : Ukuran Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pembentukan *Risk Management Committee (RMC)*

2.4.3 Pengaruh Aktivitas Komite Audit terhadap Pembentukan RMC

Aktivitas komite audit merupakan salah satu atribut yang penting untuk mengukur keefektifan kinerja mereka (Lin et al., 2006). Sesuai dengan teori agensi, untuk menurunkan asimetri informasi, komite audit harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan. Melalui rapat ini, komite audit dapat bertukar pendapat dengan para manajer dan fungsi pengendalian internal. Semakin tinggi tingkat pertemuan yang dilakukan komite audit akan menambah pengetahuan dan pemahaman komite audit terhadap perusahaan sehingga mereka dapat meningkatkan efektivitasnya dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Umumnya studi tentang ketekunan komite audit menggunakan jumlah pertemuan atau rapat komite audit yang diadakan setiap tahun sebagai proxy untuk ketekunan komite audit.

Bapepam mengatur bahwa rapat komite audit setidaknya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Frekuensi rapat yang lebih besar dapat menurunkan insiden masalah pelaporan keuangan dan meningkatkan kualitas audit eksternal (Dezoort et al. 2002 dalam Sutaryo et al. 2011). Oleh karena itu, komite audit yang menunjukkan ketekunan yang lebih besar dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan diharapkan akan meningkatkan tingkat pengawasan manajemen risiko perusahaan sehingga mendukung pembentukan RMC. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan:

H3: Aktivitas Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pembentukan *Risk Management Committee (RMC)*

2.4.4 Pengaruh Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit terhadap Pembentukan RMC

Menurut teori agensi, untuk mengatasi konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, komite audit harus memiliki kemampuan yang memadai agar dapat meningkatkan efektivitasnya. Sarbane-Oxley Act 2002 menetapkan kehadiran setidaknya satu direktur ahli keuangan pada komite audit. Sedangkan pada perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) juga mensyaratkan bahwa semua anggota komite audit memiliki pengetahuan keuangan. Di Indonesia, Bapepam mensyaratkan salah seorang anggota komite audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan serta seluruh anggota harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.

Anggota komite audit dengan keahlian pengetahuan keuangan dan akuntansi dianggap memiliki ketelitian yang tinggi dalam proses akuntansi dan dapat memperbaiki masalah pelaporan keuangan dengan tepat waktu (Lisic et al, 2011). Anggota komite audit dengan latar belakang keuangan memiliki pengalaman dan pelatihan untuk memahami kegiatan manajemen risiko sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan dengan setidaknya satu komite audit berpengetahuan finansial akan terlibat lebih aktif dalam proses manajemen risiko dan akan mendukung pembentukan RMC. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan:

H4: Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pembentukan *Risk Management Committee (RMC)*

2.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC

Menurut teori agensi, ukuran dewan yang besar berpengaruh positif terhadap asimetri informasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dewan komisaris akan berusaha meningkatkan keefektifan pemantauannya. Dalam mewujudkan pemantauan yang efektif diperlukan sumber daya yang cukup. Subramaniam, *et al* (2009) menyatakan bahwa ukuran dewan yang besar cenderung dapat menjadi sumber daya yang besar bagi dewan komisaris. Keuntungan dari jumlah dewan yang besar salah satunya adalah perusahaan memiliki sumber daya yang cukup dalam mengelola pemantauan perusahaan. Ukuran dewan yang besar akan mempermudah perusahaan dalam mendapatkan anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dan terlibat dalam komite-komite yang dibentuk dewan komisaris (Subramaniam *et al.*, 2009). Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris yang semakin besar akan memudahkan mereka untuk membentuk RMC. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan:

H5: Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh Positif terhadap Pembentukan *Risk Management Committee (RMC)*

2.4.6 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Pembentukan RMC

Menurut teori agensi salah satu cara untuk mengurangi biaya agensi adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap perilaku manajemen. Dalam hal ini dewan komisaris memiliki peran penting untuk meningkatkan pengawasan. Literatur agency menunjukkan bahwa dewan yang berasal dari luar perusahaan menyumbangkan keahlian dan objektivitas yang meminimalkan perilaku oportunistik dan pengambilalihan sumber daya perusahaan (Byrd dan Hickman 1992, Fama dan Jensen 1983a dalam Yatim 2010). Oleh karena itu, untuk mendukung pengawasan terhadap manajemen yang lebih efektif dibutuhkan komisaris independen.

Suatu dewan dengan proporsi komisaris independen yang tinggi cenderung untuk menyediakan pengawasan yang lebih besar pada aktivitas manajemen risiko perusahaan (Yatim 2009). Keberadaan komisaris independen di dalam sebuah dewan dapat meningkatkan kualitas pengawasan karena komisaris independen tidak memiliki hubungan usaha dengan perusahaan dan mereka juga berperan sebagai perwakilan independen dari kepentingan shareholder sehingga diharapkan dapat bersikap lebih *fair* dan adil dalam melakukan pemantauan.

Perusahaan dengan proporsi komisaris independen yang lebih besar ingin memberikan pengawasan yang lebih besar demi menjaga reputasi mereka. Untuk membantu meningkatkan pengawasan tersebut dibutuhkan suatu komite khusus seperti komite manajemen risiko (RMC). Oleh sebab itu, dewan yang semakin independen atau memiliki proporsi komisaris independen yang lebih besar akan

cenderung mendukung pembentukan RMC. Penelitian Yatim (2010) memberikan sebuah hasil bahwa sebuah dewan dengan proporsi komisaris independen yang besar akan membentuk RMC demi meningkatkan kemampuan pengawasan mereka. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan:

H6: Proporsi Komisaris Independen Berpengaruh Positif terhadap Pembentukan *Risk Management Committee (RMC)*

2.4.7 Pengaruh Aktivitas Dewan Komisaris terhadap Pembentukan RMC

Ketekunan dewan dalam penelitian ini merupakan jumlah pertemuan dewan dalam periode satu tahun. Dewan komisaris yang sering melakukan pertemuan berpotensi untuk meningkatkan komunikasi antara direksi dan fungsi pengendalian internal dan memungkinkan dewan untuk menjadi lebih efektif dalam pengawasan mereka (Yatim, 2010). Conger *et al.* (2008) dan Vafeas (1999a,b) dalam Yatim (2010) menyatakan bahwa banyaknya pertemuan dewan merupakan sumber daya penting dalam meningkatkan efektivitas dewan.

Oleh karena itu, dewan yang menunjukkan ketekunan yang lebih besar kemungkinan akan meningkatkan pelaksanaan fungsi pengawasan mereka. Dengan demikian, diharapkan dewan yang lebih rajin akan mendukung pembentukan komite manajemen risiko. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan :

H7: Aktivitas Dewan Komisaris Berpengaruh Positif terhadap Pembentukan *Risk Management Committee (RMC)*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel yang terdiri dari Variabel terikat (variabel dependen), variabel bebas (variabel Independen) dan variabel kontrol.

1. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yang menjadi perhatian utama peneliti. Dengan melakukan analisis terhadap variabel terikat (variabel dependen) peneliti akan menemukan jawaban atau solusi atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembentukan komite manajemen risiko (RMC).

2. Variabel Bebas (Variabel independen)

Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif atau negatif. Setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat atau dapat disimpulkan bahwa varians variabel terikat ditentukan oleh variabel bebas (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini terdapat tujuh variabel independen, yaitu: Independensi komite audit, ukuran komite audit, ketekunan komite audit, keahlian keuangan dan akuntansi komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan ketekunan dewan komisaris.

3. Variabel kontrol

Variabel kontrol berfungsi untuk untuk menjelaskan fenomena dengan optimal karena terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen, pengaruhnya menjadi terputus dan juga untuk meningkatkan kekuatan statistik dari penelitian yang dilakukan (Widhiarso, 2011). Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, leverage dan reputasi auditor. Variabel-variabel ini perlu diteliti agar hasil penelitian dapat menjelaskan fenomena dengan optimal dan untuk mengurangi bias penelitian sehingga memiliki kekuatan statistik yang lebih tinggi.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Variabel Dependen

Pembentukan Risk Management Committee (RMC)

Risk Management Committee (RMC) merupakan salah satu dewan dalam *Corporate Governance* yang memberikan perhatian penuh pada pengawasan risiko (Krus dan Orowitz, 2009). RMC memonitor tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dengan tetap memperhatikan keinginan untuk memaksimalkan keuntungan. RMC menyarankan dewan perusahaan melakukan pengelolaan terhadap eksposur risiko dan strategi risiko masa depan. Pembentukan RMC di Perusahaan-perusahaan Indonesia belum sepenuhnya direalisasikan. Dalam penelitian ini pembentukan RMC diukur dengan menggunakan Variabel dummy. Dimana perusahaan yang membentuk RMC diberi nilai 1 (satu) sedangkan perusahaan yang tidak membentuk RMC diberi nilai 0 (nol) (Yatim, 2009).

3.1.2.2 Variabel Independen

1) Independensi Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut peraturan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 komite audit dinyatakan independen jika komite tersebut:

- Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
- Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh komisaris, kecuali komisaris independen.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan komisaris, direksi, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.

- Tidak mempunyai usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan Publik.

Dalam penelitian ini independensi komite audit dihitung dengan menggunakan rasio yaitu rasio anggota komite audit yang independen terhadap total anggota komite audit (Yatim, 2009).

2) Ukuran Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang komisaris independen dan 2 (dua) orang anggota lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Sehingga jumlah anggota komite audit minimal adalah 3 (tiga) orang. Ukuran komite audit diukur dari jumlah anggota komite audit (Yatim, 2009).

3) Aktivitas Komite Audit

Menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004, komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Blue Ribbon Committee (BRC) (1999) dalam Lin *et al* (2006) merekomendasikan Komite audit bertemu setidaknya sekali setiap bulan dan mendiskusikan kualitas laporan keuangan dengan auditor eksternal. Dalam pertemuan ini komite audit akan meninjau berbagi laporan yang berkaitan dengan pengendalian internal, pelaporan keuangan dan audit eksternal. Serta akan didiskusikan isu-isu signifikan yang telah dikomunikasikan dengan manajemen yang menurut komite audit memerlukan tindak lanjut (Sutaryo dkk., n.d). Frekuensi pertemuan komite audit berhubungan dengan usaha pengurangan insiden masalah pelaporan keuangan.

Dalam penelitian ini, aktivitas komite audit diukur dari jumlah rapat komite audit dalam satu tahun (Yatim, 2009).

4) Keahlian Akuntansi atau Keuangan Komite Audit

Peraturan Sarbane-Oaxley Act 2002 mengatur kehadiran setidaknya satu direktur ahli keuangan pada komite audit sedangkan pada perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) disyaratkan bahwa semua anggota komite audit memiliki pengetahuan keuangan. Di Indonesia, berdasarkan peraturan Bapepam, mensyaratkan salah seorang dari komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi serta seluruh anggota disyaratkan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Komite audit yang anggotanya memiliki keahlian akuntansi atau keuangan memiliki pengetahuan teknis yang relevan untuk meningkatkan pengawasannya terhadap dewan sehingga akan lebih efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang material (Dezoort, 1998). Variabel ini dihitung dengan rasio yaitu rasio anggota komite audit yang memiliki keahlian *finansial* dengan total anggota komite audit (Yatim, 2009).

5) Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2006). Ukuran dewan komisaris akan berdampak pada kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi. Ukuran dewan komisaris dalam

penelitian ini merupakan jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Subramaniam *et al*, 2009).

6) Proporsi Komisaris Independen

Menurut peraturan Bapepam, komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik, tidak memiliki saham di dalam perusahaan, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama emiten, serta tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen dan untuk menjaga “*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang minoritas serta kepentingan stakeholder lainnya (Alijoyo dan Zaini, 2004 dalam Wulandari, 2009). Dalam penelitian ini komisaris independen dinyatakan dalam rasio jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris dengan jumlah total anggota dewan komisaris (Subramaniam *et al*, 2009).

7) Aktivitas Dewan Komisaris

Dewan yang menunjukkan ketekunan lebih tinggi dalam melaksanakan tanggung jawabnya akan meningkatkan pengawasannya terhadap proses pelaporan keuangan (Suripto, 2012). Aktivitas dewan komisaris dinyatakan dengan jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan dewan komisaris selama satu tahun (Yatim, 2010).

3.1.2.3 Variabel Kontrol

1) Ukuran Perusahaan

Wallace dan Kreutsfeldt (1991) dalam Yatim (2009) mengidentifikasi ukuran perusahaan sebagai salah satu karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mendirikan sebuah mekanisme pengendalian internal. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini variabel ukuran perusahaan menggunakan nilai logaritma dari total aset yang dimiliki perusahaan (\ln aset) (Lisic *et al*, 2011).

2) Kompleksitas Usaha

Perusahaan dengan jumlah segmen bisnis yang besar biasanya memiliki bermacam-macam produksi, departemen atau strategi pemasaran sehingga akan meningkatkan risiko yang akan ditanggung perusahaan (Subramaniam, et al., 2009). Kompleksitas perusahaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis usaha yang dimiliki perusahaan (Subramaniam *et al*, 2009).

3) Leverage

Leverage adalah tingkat kemampuan suatu perusahaan di dalam memenuhi kewajibannya apabila suatu saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Leverage dinyatakan dalam rasio yang dihitung dengan cara membagi total hutang dengan total asset (Yatim, 2009).

4) Reputasi Auditor

Reputasi auditor ditunjukkan dengan apakah suatu perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* yang merupakan kelompok KAP internasional untuk auditor eksternal perusahaan. Variabel reputasi auditor merupakan variabel *dummy* dimana perusahaan yang menggunakan KAP *Big*

Four akan diberi nilai 1 (satu) dan diberi nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang menggunakan KAP non-*Big Four* (Yatim, 2009).

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan non *finansial* Indonesia yang terdaftar di Bloomberg tahun 2009 hingga 2011. Pemilihan tahun 2009 hingga 2011 bertujuan untuk mengetahui kebijakan seperti apa yang diterapkan perusahaan-perusahaan pasca krisis 2008 dan juga karena menggambarkan profil perusahaan terkini.

Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan non-finansial Indonesia yang terdaftar di Bloomberg pada tahun 2009-2011
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*Annual Report*) pada tahun 2009-2011
- c. Terdapat kelengkapan data di tahun 2009-2011 yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data Independensi Komite Audit, Ukuran Komite Audit, Frekuensi Rapat Komite Audit (aktivitas komite audit), Keahlian Keuangan dan Akuntansi Komite Audit, Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Komisaris Independen, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (aktivitas dewan komisaris) dan data variabel kontrol ukuran perusahaan, kompleksitas usaha, leverage dan reputasi auditor (KAP Big Four).

3.3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan di tahun 2009-2011. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data pembentukan RMC, Independensi Komite audit, ukuran komite audit, keahlian keuangan dan akuntansi komite audit, ketekunan komite audit, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ketekunan dewan komisaris, ukuran perusahaan, kompleksitas usaha, reputasi auditor dan leverage perusahaan. Sumber data berasal dari laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari Bloomberg.

3.4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka dan metode dokumentasi yang diperoleh di perpustakaan dan *website Bloomberg*. Data kepustakaan berupa konsep-konsep dan teori-teori yang didapat dari berbagai Jurnal ilmiah, literatur, dan sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Selain itu, juga menggunakan data laporan tahunan perusahaan.

3.5. Metode Analisis

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2006) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness

(kemencengan distribusi). Dalam penelitian ini statistik deskriptif akan dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum dan standar deviasi.

3.5.2. *Logistic Regression (Regresi Logistik)*

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik karena variabel terikatnya adalah variabel *dummy*, yaitu ada pembentukan RMC atau tidak ada pembentukan RMC. Regresi logistik sebenarnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya (Ghozali, 2006). Namun dalam regresi logistik asumsi multivariate normal tidak dapat dipenuhi sehingga tidak memerlukan asumsi normalitas data pada variabel bebasnya.

Penelitian ini menggunakan tujuh variabel bebas dan empat variabel kontrol. Variabel – variabel tersebut membentuk persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{RMC} = & a + b_1 \text{IndKA} + b_2 \text{SizeKA} + b_3 \text{AkKA} + b_4 \text{AhKA} + b_5 \text{SizeDK} + \\ & b_6 \text{KOMInd} + b_7 \text{AkDK} + b_8 \text{SIZE} + b_9 \text{SEGM} + b_{10} \text{LEVR} + b_{11} \\ & \text{BIGFOUR} + e \end{aligned}$$

Keterangan :

a	= Konstanta
b	= Koefisien Regresi
e	= Kesalahan Residual

<i>Risk management committee (RMC)</i>	= Variabel <i>dummy</i> pembentukan RMC, dimana perusahaan yang membentuk RMC diberi nilai 1 (satu) dan yang tidak membentuk RMC diberi nilai 0 (nol)
Independensi Komite Audit (IndKA)	= Jumlah anggota komite audit yang independen dibagi jumlah seluruh anggota komite audit
Ukuran Komite Audit (SizeKA)	= Jumlah anggota komite audit
Aktivitas Komite Audit (AktvKA)	= Jumlah pertemuan komite audit selama satu tahun.
Keahlian Komite Audit (AhlKA)	= Jumlah anggota komite audit yang mempunyai keahlian keuangan dan akuntansi dibagi jumlah anggota komite audit
Ukuran Dewan komisaris (SizeDK)	= Jumlah anggota dewan komisaris
Proporsi komisaris independen (KOMInd)	= Jumlah komisaris independen dibagi jumlah seluruh anggota dewan komisaris

Aktivitas Dewan Komisaris (AktvDK)	= Frekuensi rapat dewan komisaris dalam satu tahun
Ukuran perusahaan (SIZE)	= Natural Logaritma dari total aset
Kompleksitas Usaha (SEGM)	= Jumlah segmen bisnis perusahaan
<i>Leverage</i> (LEVR)	= Hasil dari total liabilitas dibagi total aset
Reputasi Auditor (BIGFOUR)	= variabel <i>dummy</i> , dimana perusahaan yang menggunakan KAP BIG FOUR diberi nilai 1 (satu) dan KAP Non-BIGFOUR diberi nilai 0 (nol).

Langkah analisis pengujian model Regresil logistik adalah sebagai berikut:

1. Uji kelayakan model (Goodness of fit)

Penilaian model regresi logistik dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* yang menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai probabilitas (sig.) pada uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu memprediksi

nilai observasinya atau dapat dikatakan model diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2006).

H₀ : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A: Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (Overall fit Model Test)

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara bersama-sama (Overall) di dalam model, dapat menggunakan uji *log likelihood value* (nilai-LL). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai -2LL pada awal (*block number* = 0), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai -2LL pada saat *Block number* = 1, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai -2LL *Block Number* = 0 > nilai -2LL *Block Number* = 1, maka menunjukkan model regresi yang baik. Log likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan log likelihood menunjukkan model yang semakin baik.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Dalam Regresi Logistik untuk menguji R^2 dapat menggunakan uji Nagelkerke R^2 (Ghozali, 2006).

4. Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan adanya pembentukan RMC di suatu perusahaan. Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel bebas, dalam hal ini yang membentuk RMC (1) dan yang tidak membentuk RMC (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel bebas yang membentuk RMC (1) dan tidak membentuk RMC (0). Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%.

5. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi yang umumnya di atas 0,95, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

6. Uji hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model terhadap pembentukan RMC. pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi (alfa) yang digunakan sebesar 5% (0,05)

- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value*. Jika *p-value* (signifikan) $> \alpha$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value* $< \alpha$, maka hipotesis alternatif diterima.